

SENIN, 25 NOVEMBER 2019

 PILKADA

Meski Sulit, Melawan Politik Uang Harus Dilakukan

DEMAK - Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin mengatakan, masih sulit menghilangkan politik uang dalam proses demokrasi.

Namun demikian, upaya tersebut harus terus dilakukan agar bisa menekan dan mengurangi terjadinya politik uang. "Politik uang ini yang paling merusak. Sebab, akan melahirkan niat bagi yang melakukan agar dapat mengembalikan uang yang telah diberikan. Apalagi terhadap mereka yang uangnya diperoleh dari utang," katanya saat menjadi pembicara dalam sosialisasi pengawasan partisipatif bertema Mengikis Politik Uang dalam Pilkada 2020 di hotel Amantis, kemarin.

Kegiatan yang digelar PWI Kabupaten Demak bersama Bawaslu Jateng tersebut juga menghadirkan Dr Fitriyah MA, dosen FISIP Undip dan Amir Machmud NS, Ketua PWI Jawa Tengah, dengan moderator Khoiril Saleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Demak. Acara dihadiri seratusan peserta dari unsur pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, OPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.

Rofiudin menuturkan, untuk mengubah politik uang yang telah membudaya harus dimulai dari kepala daerah yang punya komitmen bersih dan jujur. Dia mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari pelaku jihad untuk memerangi politik uang. Keikutsertaan masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam pilkada 2020 merupakan tindakan cerdas dan tak pragmatis.

Sebab, dengan demikian dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan akan melahirkan pemimpin yang bersih.



SM/Hasan Hamid

SOSIALISASI PENGAWASAN : Komisioner Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin, menyampaikan materi dalam sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Amantis, kemarin. (22)

Hal senada disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud NS. Dia menyebutkan sinergitas PWI dan Bawaslu menjadi duet pengawasan demokrasi yang ideal. Media massa memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan publik agar terbangun demokrasi yang baik sesuai harapan masyarakat.

Sementara Fitriyah menyinggung modus dan aktor politik uang yang sering terjadi dalam proses pemilu. Identifikasi tersebut untuk memudahkan

mengetahui siapa, kapan, dengan cara apa dan untuk apa politik uang dilakukan.

Menurutnya, politik uang memiliki dampak bagi para pemilih, yakni berpotensi menghalangi kebebasan dalam keputusan memilih karena terpengaruh oleh kekuatan uang.

"Hal ini tentu harus dihindari, karena keputusan memilih dan memberi dukungan atas dasar pemberian uang," ungkap Fitriyah yang juga mantan Ketua KPU Jateng tersebut. (H1-22)